

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA TRI MANUNGGALEK KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Srata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

SITI ASYIAH
10875004390



**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TRI MANUNGGAL KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Siti Asiyah

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 pasal 3 yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana lembaga tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi badan permusyawaratan desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas maka populasi penelitian ini adalah anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat. sedangkan teknik pengambilan sampel untuk anggota BPD Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menggunakan teknik sensus karena jumlahnya yang sedikit, sedangkan untuk Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui kuesioner dan wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah sebelumnya tentang arsip-arsip rapat desa dan sudah dipublikasikan tentang demografi desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa di desa Tri manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada pada kategori tidak baik dengan persentase 57,38% meliputi fungsi legislasi dengan persentase 54,70%, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan persentase 62,65%. Sesuai dari hasil penelitian ini, maka Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan fungsinya di pemerintahan desa.

Kata kunci : Fungsi BPD, pemerintahan desa

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pemerintah Daerah	14
2.2 Otonomi Desa	15
2.3 Pemerintah Desa	17
2.4 Fungsi BPD	20
2.5 Perencanaan Pembangunan Desa	23
2.6 Konsep Islam	25
2.7 Penelitian Pendahuluan	28
2.8 Kerangka Pemikiran	29
2.9 Defenisi Konsep	29
2.10 Hipotesis	30
2.11 Konsep Operasional	31
2.12 Indikator Penelitian	33
2.13 Teknik Pengukuran	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Populasi dan sampel	35

	3.4 Teknik Pengambilan Sampel	36
	3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	37
	3.6 Metode Pengumpulan Data.....	37
	3.7 Analisa Data.....	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	4.1 Letak Geografis	40
	4.2 Keadaan Penduduk	40
	4.3 Pemerintahan Desa	43
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Identitas Responden.....	45
	5.2 Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	47
	5.3 Analisis Data.....	64
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Kesimpulan	68
	6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Daftar Jumlah Anggota BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	2
Tabel I.2 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas Anggaran APBDes di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	4
Tabel I.3 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membentuk Kepengurusan Baru LINMAS di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	5
Tabel I.4 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas 5 Pilar Kabupaten Kampar di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	7
Tabel I.5 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas Musbang Des di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	8
Tabel I.6 : Kegiatan BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012	10
Tabel II.1 : Penelitian Pendahuluan	28
Tabel II.2 : Operasional Indikator	32
Tabel III.1 : Distribusi Populasi dan Sampel di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	36
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk dilihat dari Penganut Agama di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.	41
Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	41
Tabel IV.3 : Jumlah penduduk dilihat dari jenjang Pendidikan di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar....	32
Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.	43
Tabel V.1 : Golongan umur atau usia Responden masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	45
Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	46

Tabel V.3 :	Jenis Kelamin Responden masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	47
Tabel V.4 :	Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Anggota BPD.....	48
Tabel V.5 :	Tanggapan Responden tentang Merumuskan Peraturan Desa	49
Tabel V.6 :	Tanggapan Responden tentang Pengadaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa yang diselenggarakan BPD bersama Kepala Desa	50
Tabel V.7 :	Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Membuat Peraturan Desa	50
Tabel V.8 :	Tanggapan Responden tentang BPD dan Kepala Desa Menetapkan Segala Sesuatu yang Menyangkut Kepentingan Masyarakat Desa	51
Tabel V.9 :	Tanggapan Responden tentang BPD Sosialisasikan Peraturan Desa yang telah disahkan ke Masyarakat Desa...	52
Tabel V.10 :	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	53
Tabel V.11 :	Tanggapan Responden tentang BPD Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap Aspirasi Dari Masyarakat	56
Tabel V.12 :	Tanggapan Responden tentang BPD Mencatat Semua Aspirasi Dari Masyarakat.....	56
Tabel V.13 :	Tanggapan Responden tentang BPD Menindaklanjuti Aspirasi Dari Masyarakat.....	57
Tabel V.14 :	Tanggapan Responden tentang Jadwal Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat	57
Tabel V.15 :	Tanggapan Responden tentang Koordinasi Jadwal Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat	58
Tabel V.16 :	Tanggapan Responden tentang Rapat Koordinasi Antara BPD dengan Perangkat Desa.....	58
Tabel V.17 :	Tanggapan Responden tentang BPD Telah Melaksanakan Kepentingan Masyarakat	59

Tabel V.18 :	Tanggapan Responden tentang BPD Mengawasi Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.	59
Tabel V.19 :	Tanggapan Responden tentang Koordinasi Dari BPD Dalam Rapat Ulang Jika Pelaksanaan Aspirasi Belum Terealisasi	60
Tabel V.20 :	Tanggapan Responden tentang Terealisasinya Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat Yang Telah Disampaikan Masyarakat Ke BPD	61
Tabel V.21 :	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	62
Tabel V.22 :	Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian Tentang Fungsi BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut masyarakat mengharapkan implementasi otonomi daerah terutama masyarakat tingkat desa. Untuk mewujudkannya maka di bentuklah suatu lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai landasan Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar juga memiliki BPD. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD tersebut memiliki beberapa anggota. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang BPD pasal 8 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan tertentu. Salah satunya jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

Desa Tri Manunggal termasuk didalamnya karena mempunyai jumlah penduduk 3.181 jiwa. Namun anggota BPD di desa tersebut saat ini hanya 8 orang karena 3 orang telah keluar dari lembaga tersebut. Berikut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel I.1 : Daftar Jumlah Anggota BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	H. Darman Daulay	Ketua BPD	Parpol
2	Sunardi	Wakil Ketua BPD	T. Masyarakat
3	Nurdin	Sekretaris BPD	T. Masyarakat
4	Indah Susilowati	Bendahara BPD	T. Wanita
5	Usman	Anggota BPD	T. Pemuda
6	Komarudin	Anggota BPD	T. Masyarakat
7	katiman	Anggota BPD	T. Masyarakat
8	Sumedi	Anggota BPD	T. Masyarakat

Sumber : Kantor BPD Desa Tri Manunggal Kec. Tapung Kab. Kampar

Selanjutnya dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Kelurahan menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kerangka sebagai penyelenggara pemerintahan desa BPD mempunyai fungsi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 yaitu Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan pasal 34 tentang BPD.

Fungsi Legislasi yaitu pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang di buat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaannya. Dalam setiap pembentukan Peraturan Desa di perlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPD.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa merupakan semua peraturan desa yang di tetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Supaya peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka di perlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dalam rapat membahas Anggaran APBDes menetapkan:
 - a. Retribusi Non Plasma dikenakan pungutan sebesar Rp.6000/1 bulan/Kepala Keluarga.
 - b. Perawatan makam. Bagi seluruh warga desa tri manunggal dikenakan biaya perawatan makam sebesar 2kg/1 tahun dipungut setiap 6 bulan sekali (1kg/6 bulan).

Tabel I.2 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas Anggaran APBDes di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1.	Sutaji	Tokoh Masyarakat
2.	Usman	Anggota BPD
3.	Suyatmo	Kadus II
4.	Dartono	Ketua RT 03
5.	Surip Sutriono	Ketua RT 13
6.	Jumawan	Ketua RT 06
7.	Lukman H	RT 10
8.	H. Syamsudin Abdullah	Tokoh Agama
9.	Miswan	Masyarakat
10.	H. Adikin	Kelompok Tani 170
11.	Madkapullah	-
12.	Wakimin	RT 07
13.	Hadiyanto	RT 20
14.	Asep Pudín	-
15.	Amirudin	Kepala Sekolah Mts
16.	Sugiono	RT 19
17.	Suprpto	Masyarakat
18.	H. Suhadi	RW 02
19.	Abdul Koliq	Kadus III
20.	Waras	RW 04
21.	Awaludin	Kadus IV
22.	Sukarno	RT 01
23.	M. Hamet	RW 07
24.	Sarji	RW 03
25.	Abdul Rohman	RT 16
26.	Radimin	Ketua RT
27.	Suparman	-
28.	Sapendra	Masyarakat
29.	Yuli S. Hasibuan	Wakil Ketua RT 17
30.	Sulaiman	RW 08
31.	Laksono Haryoko	LINMAS
32.	H. Darman	Ketua BPD

Sumber : arsip kantor desa tri manunggal

2. Dalam rapat membentuk kepengurusan baru LINMAS menetapkan:
 - a. Saudara Untung sebagai Ketua Danton.
 - b. Saudara Tumijan sebagai Wakil Danton.
 - c. Saudara Mahyar sebagai Sekretaris merangkap Bendahara.

Tabel I.3 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membentuk Kepengurusan Baru LINMAS di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1.	Edi Purwanto	
2.	Alberson Samosir	
3.	Jainul	
4.	Jamal	
5.	Tumijan	
6.	Jamiran	
7.	Miswan	
8.	Untung	
9.	Sutarto	
10.	Kasidi	LINMAS
11.	Laksono Haryoko	DATON LINMAS
12.	Karsum	
13.	Waluyo	
14.	Yono	
15.	Aguslim	
16.	Sunaryo	FKPM
17.	Suhadi	FKPM
18.	Sadam	Kaur Desa
19.	Tasidi	Kaur Desa
20.	Siti Rodiah	Bendahara

Sumber : arsip kantor desa tri manunggal

Dalam rapat membahas Anggaran APBDes dari BPD yang hadir hanya Ketua BPD dan 1 anggota BPD dan dalam rapat membentuk kepengurusan baru LINMAS tidak ada satupun anggota BPD yang hadir. Hal ini menjadi bukti bahwa BPD kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Rapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dalam rapat membahas 5 pilar Kabupaten Kampar adalah:

- a. Peningkatan ahklaq dan moral.
- b. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
- c. Peningkatan sumber daya manusia.
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan.
- e. Peningkatan infrastruktur.

Dengan hasil rapat:

- a. Kadus IV Awaludin: pembangunan jembatan jalur 6B, 4B, 3B dan penerangan kuburan.
- b. Bapak Walidi Kepala Sekolah SDN 009: pembuatan pagar sekolah 100m, pembuatan kantor dan pembuatan toilet SDN 009.
- c. Toga Syamsudin: renovasi TK R.A.
- d. Ibu Sri: tanah timbun di posyandu, meja, kursi dan tralis posyandu.
- e. Bapak Marsani: perubahan rumah bidan.
- f. Kadus I kapullah: pencucian parit jalan poros dari jalur 1-7.

Tabel I.4 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas 5 Pilar Kabupaten Kampar di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1.	Walidi	Kepala Sekolah SDN 009
2.	Hadiyanto	Ketua RT 20
3.	A. Ngadin	Ketua RT 09
4.	Tukijan	LPM
5.	Abdul Kholiq	Kadus III
6.	Anwar Said	RT 08
7.	Sumarsani	Kepala Puskesmas
8.	Wakimin	RT 07
9.	H. Darman Daulae	Ketua BPD
10.	Yusuf S.	RW 01
11.	Sulaiman	RW 08
12.	Turono	Majelis Ta'lim
13.	Suwito	T.A
14.	Nursalim	RT
15.	Tohirin	-
16.	Sarji	RW 03
17.	Anton Prayitno	RT 12
18.	Tukiman	RT 18
19.	Nyaimin	RT
20.	Sujatno	Kadus II
21.	Mahyar	LINMAS
22.	Sukarno	RT 01
23.	Yono	RT 02
24.	Satimin	RT 15
25.	M. Hamed	RW 07
26.	Sugiono	RT 19
27.	Radimin	RT 20
28.	Yudi	-
29.	Jumawan	-
30.	H. Syamsudin	Tokoh Agama
31.	Madkapullah	Kadus I
32.	Sadam	Kaur Desa
33.	Erlina	Bidan Desa
34.	Sukaesih	Kader Posyandu

Sumber : arsip kantor desa tri manunggal

2. Dalam rapat membahas musbang des dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan ahklaq dan moral: tabungan atau iuran PHBI.
 - b. Kadus II Sujatno: penimbunan jalan dari jalur 3a-5a.

Tabel I.5 : Daftar Hadir Dalam Rapat Membahas Musbang Des di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1.	Pitua Simanjuntak	Pendeta
2.	Sadi	Petani
3.	Salman	Petani
4.	Sriwidodo	RT 12
5.	Jumawan	RT 06
6.	Awaludin	Kadus IV
7.	Abdul Kholiq	Kadus III
8.	Sujatno	Kadus II
9.	Wahyono	-
10.	Japar	RW 04
11.	Abdul Wahid	RT 08
12.	Sulaiman	RW 08
13.	Lukman H.	RT 10

Sumber : arsip kantor desa tri manunggal

Dalam rapat membahas 5 pilar Kabupaten Kampar dari BPD yang hadir hanya Ketua BPD dan dalam rapat membahas musbang des tidak ada satupun dari anggota BPD yang hadir. Hal ini membuktikan bahwa BPD tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari ketentuan-ketentuan yang penulis jabarkan pada halaman 1-3 telah jelas segala sesuatu yang menjadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan kenyataan di lapangan yang terletak di desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketentuan tersebut tidak berjalan maximal yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tri manunggal kurang tanggap dalam menangani permasalahan desa seperti tentang keamanan desa. Hal ini terlihat karena BPD tidak bekerja sama dengan kepala desa untuk menetapkan peraturan desa tentang keamanan secara jelas. Kepala desa sendiri yang berinisiatif untuk mengaktifkan poskamling, poskamling ini hanya bejalan sekitar dua bulan hal ini terjadi karena tidak ada sanksi yang ditegakkan jika tidak menjalankan poskamling tersebut.(hasil wawancara sekretaris desa yaitu bapak Much Bubi pada hari senin tanggal 21 november 2011).
2. Kurangnya komunikasi antar anggota dengan pimpinan BPD itu sendiri. Hal ini dapat di lihat dari ketidakhadiran anggota BPD dalam rapat yang di selenggarakan di desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.2-I.5.
3. BPD kurang maksimal dalam melakukan tugasnya karena masih banyak kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6 : Kegiatan BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2012

No	Tentang	Pelaksana	Pokok-pokok Kegiatan	Hasil Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Pengawasan terhadap pembangunan pagar di sekitar kantor desa	Darman Daulay	Melihat langsung ke lokasi pembangunan	Telah terlaksana	-
2.	Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat	Seluruh anggota BPD dan aparat desa	Rapat	Belum terlaksana	Tidak ada koordinasi
3.	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat kerja	Belum terlaksana	Anggota banyak tidak hadir
4.	Pengawasan terhadap pembelian perlengkapan kantor desa	Indah Susilowati	Melihat langsung ke kantor desa	Telah terlaksana	Perlengkapan kantor telah tiba di kantor
5.	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD dan peserta rapat	Rapat dengar pendapat	Belum terlaksana	Jadwal belum ditentukan
6.	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat pimpinan BPD	Belum terlaksana	-

Sumber : Kantor BPD Desa Tri Manunggal Kec. Tapung Kab. Kampar

Dalam tabel tersebut terlihat ada 4 kegiatan dari 6 kegiatan yang tidak terlaksana. Hal ini terjadi karena anggota BPD kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.

4. Belum di lakukannya penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat. contohnya pembangunan desa seperti perbaikan jalan dengan cara penimbunan pasir, perbaikan sarana umum yaitu pasar dan lain sebagainya. (hasil wawancara kepala desa yaitu bapak Ponijan pada hari

rabu 07 maret 2012). Hal tersebut membuktikan bahwa Kurang berfungsinya BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan memperhatikan keberadaan BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat pada PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan dikaitkan dengan tugas sehari-hari, maka belum sejalan dengan PP tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *”Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: *”Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?”*.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini ialah:

1. Untuk peneliti: sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang analisis fungsi BPD.
2. Untuk para praktisi: memberikan informasi mengenai fungsi BPD yang diharapkan dapat di jadikan masukan untuk peningkatan kinerja anggota BPD di Desa trimanunggal kecamatan tapung kabupaten kampar agar lebih baik lagi.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti teori tentang pemerintah daerah, otonomi desa, pemerintah desa, fungsi BPD, perencanaan pembangunan desa, konsep islam, penelitian pendahuluan, kerangka pemikiran,

definisi konsep, hipotesis, konsep operasional, variabel penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian , populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel , jenis dan sumber data , metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum objek yang akan diteliti, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa trimanunggal kecamatan tapung kabupaten kampar.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
4. Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab ,serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.(Sedarmayanti 2004:10)

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

2.2 Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan keluasaan dan kesempatan bagi Desa dan memerdayakan masyarakat Desa. Masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu upaya penguatan, kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotongroyong masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan Desa dan Kelurahan.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Haw Widjaja, 2010 : 165).

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut C.S.T. Kansil (2001 : 58) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.

Sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 1 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah

Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

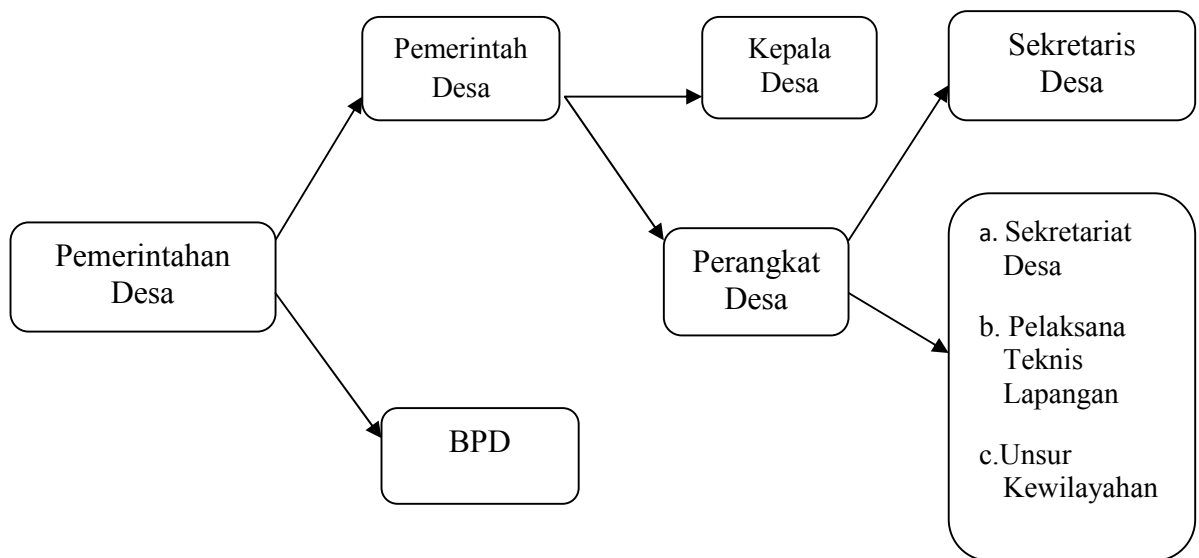
Desa otonom merupakan desa yang di bentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri. Mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

Pembentukan desa baru dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai perwujudan pembangunan demokrasi dan pendidikan politik bangsa pada tingkat lokal. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk, Luas wilayah, Bagian wilayah kerja, Perangkat dan Sarana dan prasarana pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 2 Tentang Desa.

Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; Tugas pembantuan dari pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 7.

Skema penyelenggara pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 11, 12 dan 13

Skema di atas memuat jumlah perangkat Desa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa di tetapkan dengan peraturan Desa. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat: Tata cara penyusunan struktur organisasi, Perangkat, Tugas dan fungsi serta Hubungan kerja.

2.4 Fungsi BPD

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995: 113) definisi fungsi adalah kegunaan suatu hal; jabatan; kedudukan faal (kerja suatu bagian tubuh). Sjachran Basah mengatakan bahwa fungsi menurut *Natuurwissenschaft* mempunyai empat arti sedangkan dalam *Geisteswissenschaft* mempunyai tiga arti yaitu :

1. Fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *Natuurwissenschaft*),
2. Fungsi berarti tugas atau *ambtwerkingin bet verband met bet gebeel* (arti kedua dari *Natuurwissenschaft* dan arti pertama dari *Geisteswissenschaft*),
3. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan (arti ketiga dari *Natuurwissenschaft* dan arti kedua dari *Geisteswissenschaft*),
4. Fungsi berarti *werking/baca*; pekerjaan (arti keempat dari *Natuurwissenschaft* dan arti ketiga dari *Geisteswissenschaft*).

Menurut Soekanto (1990:268) fungsi meliputi norma yang dilambangkan dalam posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa bisa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Thoha (1990:25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Pengertian fungsi menurut Rivai (2004:140) diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 1 Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 9 dan pasal 10 menyatakan bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Mekanisme dari musyawarah dan mufakat adalah : rapat dilaksanakan di desa setempat, rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan keputusan tertinggi adalah keputusan musyawarah.

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 42 Ketentuan lebih rinci mengenai BPD, di tetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat: Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota; Pengesahan penetapan anggota, Fungsi dan wewenang; Hak, kewajiban dan larangan; Pemberhentian dan masa keanggotaan; Penggantian anggota dan pimpinan; Tata cara pengucapan

sumpah/janji; Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja; Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Hubungan kerja dengan kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan; Keuangan dan administratif.

Untuk pelaksanaan rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Rapat tersebut dipimpin oleh pimpinan BPD. Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan di tetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan di tetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil Rapat BPD di tetapkan dengan keputusan BPD dan di lengkapi dengan notulen rapat yang di buat oleh Sekretaris BPD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 15.

Selanjutnya mengenai aspirasi masyarakat yaitu pandangan atau pendapat, pikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan atauu harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap aspirasi masyarakat yang di terima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu di tampung dan di saring untuk di bahas dalam rapat anggota BPD. Hasil pembahasan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab BPD untuk menindaklanjuti sesuai dengan aspirasi yang di terima. Aspirasi masyarakat yang di tindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan

kemasyarakatan. Setiap aspirasi yang di terima oleh BPD harus di catat dan di bukukan oleh sekretaris BPD. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 24.

Sesuai dengan PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

1. Menetapkan peraturan desa yaitu merumuskan peraturan desa, membuat peraturan desa bersama pemerintah desa dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam meyelenggarakan pembangunan desa. Dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat.

2.5 Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan biasanya di definisikan sebagai "rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)." apabila definisi sederhana tersebut di simak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas (sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel).
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per defisi* bersifat multidimensional (mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan).
7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 63, 65, 66 menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Dan dalam

melaksanakannya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup: Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Profil Desa, Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tersedianya Peta Desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi: wilayah administrasi pemerintahan desa; peta potensi desa (alam, pertanian, tambang, flora, fauna dan sebagainya); peta prasarana/sarana di desa (ekonomi, sosial budaya dan sebagainya); peta yang menggambarkan kondisi kependudukan, keadaan dan permasalahannya.

Selain itu diperlukan juga Analisa data, keadaan desa dan permasalahannya serta tokoh pemuda/ masyarakat, tenaga ahli/terdidik, kader pembangunan desa dan sebagainya.

Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2.6 Konsep Islam

Lembaga Legeslatif Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

- Fungsi Dan Peran Legeslasi Dalam Praktik Sahabat

Pada masa Rasulullah SAW, *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* adalah parasahabat, yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tam masuk Islam (*al-sābiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta

menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan tugas baik kaum Ansar maupun kaum Muhajirin.

Mereka ini bukanlah pilihan rakyat secara resmi, Tetapi lantaran mereka mempunyai pengaruh yang kuat ditengah masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas Muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam Musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan-urusan mereka pada orang pilihan tersebut. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan ahl al-hall wa al-'aqd adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, beliau membentuk "*Team Formatur*" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah beliau wafat. Ulama fiqh menyebut anggota formatur tersebut sebagai ahl al-hall wa al-'aqd.

ketika Umar dan Ubaidah mem-bai'at Abu Bakar menjadi Khalifah, didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem-bai'at Abu Bakar, setelah itu suku Aus melihat apa yang dilakukan oleh Basyir, maka mereka pun mem-bai'at Abu Bakar. Dari peristiwa pengangkatan abu bakar jadi khalifah ini ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu adalah para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.

Artinya : *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka."*(Q.S. Asy-Syuura : 38)

2.7 Penelitian Pendahuluan

Tabel II.1
Penelitian Pendahuluan

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL	METODE	KESIMPULAN
1.	Deni Murdani	2008	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis	Kualitatif	Hasil penelitian analisis fungsi badan permusyawaratan desa menunjukkan bahwa peranan BPD kurang berfungsi.
2.	Riadi	2008	Analisis Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir	Kualitatif	Hasil penelitian analisis pelaksanaan tugas pemerintahan desa menunjukkan bahwa tugas pemerintahan desa kurang terlaksana.
3.	Iron Bastion	2009	Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa menunjukkan bahwa peranan BPD kurang terlaksana.
4.	Nurhadi Irawan	2010	Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	Kualitatif	Hasil penelitian analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa menunjukkan bahwa peranan BPD cukup terlaksana.
5.	Ika Putri Dani	2011	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Kualitatif	Hasil penelitian analisis fungsi badan permusyawaratan desa menunjukkan bahwa peranan BPD kurang berfungsi.

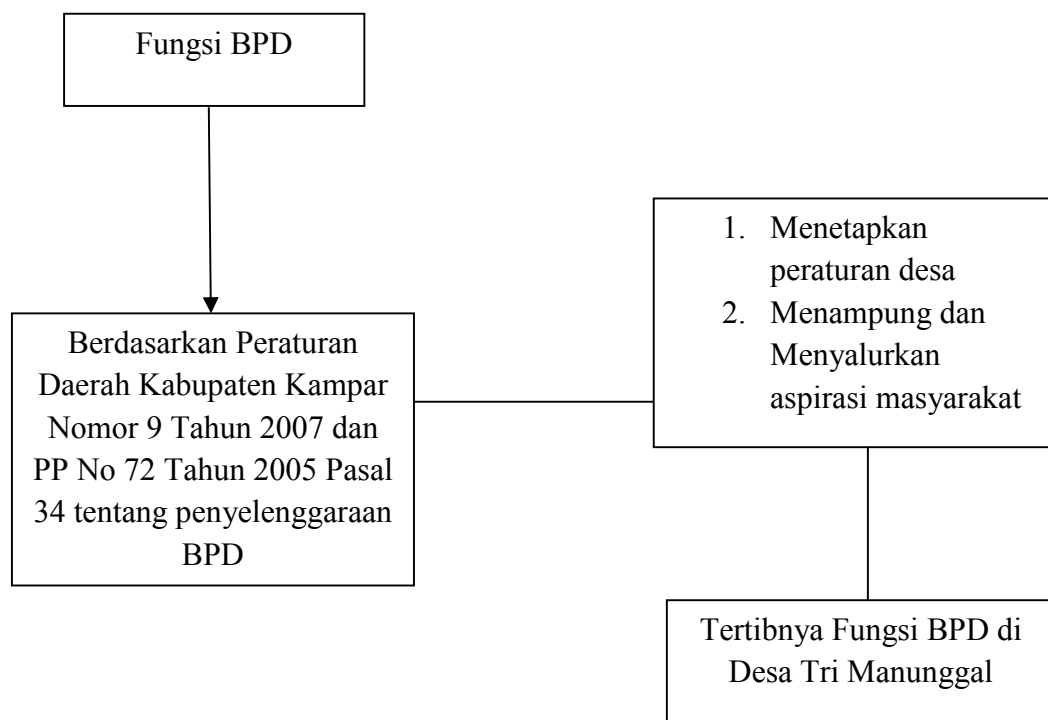
Sumber : penelitian-penelitian terdahulu yang diolah oleh peneliti.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari lima (5) penelitian menunjukkan bahwa aparat desa kurang berfungsi dengan baik. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya kinerja para birokrat kita.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam telaah pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran Analisis Fungsi BPD di Desa Trimanunggal
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar



2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006: 33) . adapunbatasan defenisi konsep tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Otonomi Desa merupakan atonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2.10 Hipotesis

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

”Di duga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikarenakan anggota BPD kurang memahami tentang cara kerja sebagai anggota BPD”.

2.11 Konsep Operasional

Untuk menganalisis fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 3 dan PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat:

1. Menetapkan peraturan desa.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun operasional indikator penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.2
Operasional Indikator

konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4
Fungsi BPD di desa trimanunggal kecamatan tapung kabupaten kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan pasal 34	1. Menetapkan Peraturan Desa	a. Merumuskan peraturan desa. b. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa. c. Membuat peraturan desa bersama pemerintah desa. d. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. e. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.	Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
	2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	a. Bagaimana menerima masukan atau saran dari masyarakat. b. Mencatat semua aspirasi masyarakat. c. Bagaimana cara menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat. d. Bagaimana menetapkan jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat. e. Bagaimana mengkoordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat. f. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa. g. Melaksanakan kepentingan masyarakat.	

		<ul style="list-style-type: none"> h. Mengawasi pelaksanaan dalam meyelenggarakan pembangunan desa. i. Melakukan rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi. j. Pelaksanaan dari aspirasi masyarakat. 	
--	--	---	--

2.12 Indikator Penelitian

Adapun yang menjadi indikator dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 dan PP NO 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan desa.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.13 Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini maka penulis menetapkan teknik pengukuran dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Indikatornya, adapun teknik pengukuran sebagai berikut:

1. Untuk Fungsi BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung ditetapkan ukurannya sebagai berikut:

Berperan : Bila semua kriteria indikator fungsi BPD telah terlaksana.

Tidak Berperan : Apabila indikator fungsi BPD yang terlaksana.

2. Sedangkan untuk ukuran dari indikasi Fungsi BPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Desa dikatakan:

Baik : Bila semua item-item penilaian telah dilaksanakan.

Tidak Baik : Bila 2 dari 3 item penilaian yang dilaksanakan.

Sangat Tidak Baik : Bila 1 atau tidak satupun dari item penilaian dilaksanakan.

- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dikatakan:

Baik : Bila semua item-item penilaian telah dilaksanakan.

Tidak Baik : Bila 2 dari 3 item penilaian yang dilaksanakan.

Sangat Tidak Baik : Bila 1 atau tidak satupun dari item penilaian dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPD di desa trimanunggal kecamatan tapung kabupaten kampar. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012.

3.3 Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Menurut sugiono (2007:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan untuk dijadikan responden dalam penelitian. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1
Distribusi Populasi dan Sampel di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

NO	Jenis Populasi	Populasi (N)	Sampel (n)
1	Ketua BPD	1	1
2	Anggota BPD	7	7
3	Kepala Desa	1	1
4	Sekretaris Desa	1	1
5	Kepala Urusan	4	4
6	Kepala Dusun	4	4
7	Ketua RW	8	4
8	Ketua RT	20	4
9	Tokoh Agama	6	2
10	Tokoh Pendidikan	8	2
11	Tokoh Pemuda	10	2
12	Tokoh Wanita	5	2
Jumlah		75	34

Sumber : Data Kantor Desa Tri Manunggal Tahun 2012.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah menggunakan teknik sensus karena selain jumlahnya relatif kecil dan mudah untuk ditemui. Sedangkan untuk Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat adalah menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu, penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita pertimbangannya sampel yang diambil ialah orang-orang yang sering mengikuti rapat desa sedangkan Ketua RT dan Tokoh Pendidikan pertimbangannya sampel yang diambil ialah orang-orang yang mudah untuk ditemui.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian secara langsung yang bersumber dari responden, berupa informasi dan wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari tempat penelitian yang sifat data tersebut sudah dipublikasikan atau diolah sebelumnya, tentang demografi Desa trimanunggal.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari data primer dengan menggunakan:

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada kantor BPD diDesa Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Berkomunikasi atau tanya jawab langsung kepada responden yang telah di jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari seluruh aparatur pada

kantor Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris desa dan beberapa tokoh masyarakat.

c. Angket

Di lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara di sebarakan daftar pertanyaan (angket) tersebut kepada seluruh aparaturnya pada kantor BPD yang berjumlah 8 orang, beberapa perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat.

3.7 Analisa Data

Penelitian ini berbentuk kualitatif jadi peneliti menggunakan analisa data deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai pelaksanaan fungsi BPD di desa trimanunggal kecamatan tapung kabupaten kampar berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Dan menggunakan rumus prosentase sebagai berikut (Anas Sudijono, 2007:43):

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan : F = Frekuensi

N = Jumlah Subyek Penelitian

P = Prosentase

Adapun pengukuran terhadap variabel penelitian dan indikator penelitian ini menggunakan tiga alternatif jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Husaini Usman 2009:146):

- | | |
|-------------------|--|
| Baik | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 61%-100%. |
| Tidak Baik | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 31%-60%. |
| Sangat Tidak Baik | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 0%-30%. |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Desa Tri Manunggal merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan Luas desa lebih kurang 1.522,5 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sekarbumi Alam Lestari.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Cermin.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Muktisari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Primer Kota Garo.

Ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 40 m dengan suhu udara rata-rata 22° - 31° C. Jarak dari pusat pemerintahan desa menuju ibu kota kecamatan \pm 29 km sedangkan menuju ibu kota kabupaten \pm 59 km dan menuju ibu kota provinsi \pm 67 km. Desa Tri Manunggal mempunyai tanah kas desa sekitar 6 Ha, pemakaman 1 Ha dan pasar desa 2 Ha.

4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berjumlah 3.166 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.698 jiwa dan perempuan 1.468 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 774 KK.

1. Agama

Penduduk desa Tri Manunggal mayoritas beragama islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk dilihat dari Penganut Agama di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase(%)
1.	Islam	3.099	97,88%
2.	Khatolik	67	2,12%
Jumlah		3.166	100%

Sumber : Kantor Desa Tri Manunggal 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk di desa tri manunggal kecamatan tapung kabupaten Kampar beragama islam yakni 3.099 jiwa atau 97,88% selanjutnya warga yang beragama khatolik berjumlah 67 jiwa atau 2,12%.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM). Oleh karena itu beberapa sarana pendidikan dibangun seperti taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	2	33,33%
2.	Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI)	2	33,33%
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	16,67%
4.	Madrasah Aliyah (MA)	1	16,67%
Jumlah		6	100%

Sumber : Kantor Desa Tri Manunggal 2012

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di desa tri manunggal masuk pada kategori standar karena hanya sampai tingkat SMA. Berikut rinciannya TK sebanyak 2 buah atau 33,33% selanjutnya SD

sederajat sebanyak 2 buah atau 33,33% dan MTs 1 buah atau 16,67% serta MA 1 buah atau 16,67%.

Jumlah masyarakat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah penduduk dilihat dari jenjang Pendidikan di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1.	Tidak tamat SD	439	14,94%
2.	Tamat SD	601	20,45%
3.	SLTP umum	574	19,53%
4.	SLTP kejuruan	475	16,16%
5.	SLTA	337	11,47%
6.	SMK	479	16,30%
7.	DIPLOMA	21	0,71%
8.	S1	13	0,44%
Jumlah		2939	100%

Sumber : Kantor Desa Tri Manunggal 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rendahnya pendidikan penduduk di desa tri manunggal karena jumlah terbanyak hanya sampai tamat SD yakni 601 jiwa atau 20,45% pada urutan kedua yaitu SLTP umum berjumlah 574 jiwa atau 19,53% dan pada urutan ketiga yaitu SMK berjumlah 479 jiwa atau 16,30% selanjutnya SLTP kejuruan berjumlah 475 jiwa atau 16,16% dan yang paling memprihatinkan cukup banyak yang tidak tamat SD yakni 439 jiwa atau 14,94% pada urutan selanjutnya yaitu SLTA berjumlah 337 jiwa atau 11,47% dan hanya sedikit yang mencapai perguruan tinggi yakni DIPLOMA berjumlah 21 jiwa atau 0,71% dan S1 berjumlah 13 jiwa atau 0,44%.

3. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat desa tri manunggal bermacam-macam tetapi mayoritas petani sawit karena tanah di desa ini gambut dan sangat cocok ditanami

sawit. Masyarakat memilih sawit juga karena tanaman ini berfungsi untuk jangka panjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase(%)
1.	Petani	700	95,63%
2.	PNS	14	1,91%
3.	Pertukangan	8	1,09%
4.	Wiraswasta	10	1,37%
Jumlah		732	100%

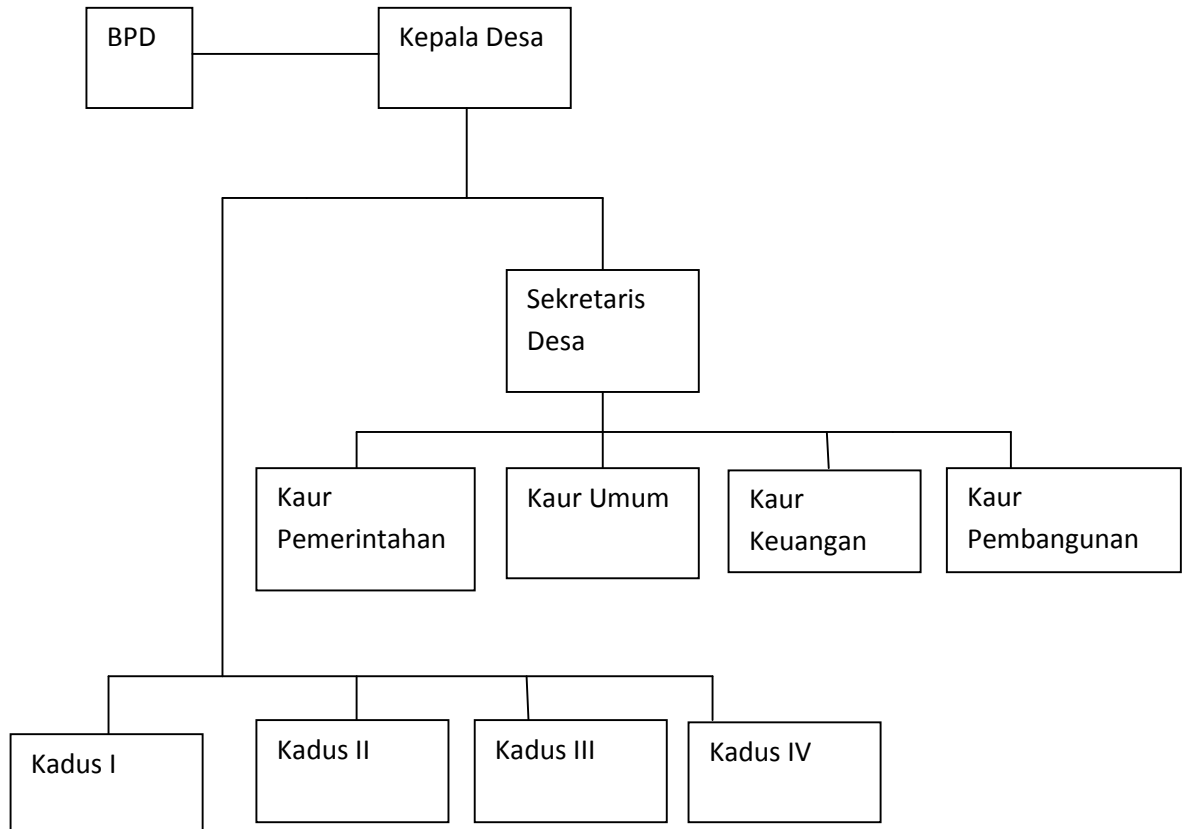
Sumber : Kantor Desa Tri Manunggal 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk di desa tri manunggal bekerja sebagai petani yakni sebanyak 700 jiwa atau 95,63% dan penduduk yang telah PNS sebanyak 14 jiwa atau 1,91% dan yang berwiraswasta sebanyak 10 jiwa atau 1,37% dan hanya sedikit yang bekerja sebagai tukang yaitu 8 jiwa atau 1,09%.

4.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan wujud kesatuan masyarakat dan dalam segi administrasi mengikuti peraturan dari Negara. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini bagan organisasi desa :

**BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TRI
MANUNGGAL KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Agar penelitian ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan maka data yang disajikan harus jelas, sehubungan dengan analisis fungsi BPD maka diperlukan identitas responden dari unsur anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang menyangkut tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

5.1.1 Usia Responden

Data tentang identitas responden menyangkut tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Golongan Umur atau usia Responden Masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Golongan Umur Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	26 s/d 37 Tahun	13	38,23%
2.	38 s/d 49 Tahun	6	17,65%
3.	50 s/d 76 Tahun	15	44,12%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data olahan penelitian, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden usia 50 s/d 76 Tahun lebih banyak yaitu 15 responden atau 44,12% karena menurut penulis pada usia tersebut masyarakat banyak mengetahui tentang jalannya pemerintahan di desa. Selanjutnya usia 26 s/d 37 Tahun sebanyak 13 responden atau 38,23% dan usia 38 s/d 49 Tahun sebanyak 6 responden atau 17,65%. Usia 38 s/d 49 tahun

jumlahnya sedikit karena menurut penulis pada usia ini masyarakat desa kurang mengetahui tentang kinerja pegawai desa.

5.1.2 Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan sangat dibutuhkan karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang/pola pikir dan kinerja seseorang. Pendidikan responden merupakan kriteria yang ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasinya dalam kebutuhan penelitian. Berikut ini data tentang identitas responden yang menyangkut tingkat pendidikan dari anggota BPD.

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1.	Tamat SD	11	32,35%
2.	Tamat SMP	10	29,41%
3.	Tamat SMA	9	26,47%
4.	Tamat sarjana (S1)	4	11,76%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pendidikan responden paling banyak tamatan SD yakni 11 orang atau 32,35%. Selanjutnya tamat SMP sebanyak 10 orang atau 29,41%, tamat SMA sebanyak 9 orang atau 26,47% dan tamat sarjana sebanyak 4 orang atau 11,76%. Keadaan ini sesuai dengan kenyataan masyarakat desa yakni kebanyakan orang dewasa hanya sampai tamat SD dan yang tamat sarjana hanya sebagian kecil.

5.1.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden masyarakat Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1.	Laki-laki	30	88,23%
2.	Perempuan	4	11,76%
Jumlah		34	100%

Sumber : data olahan penelitian,2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 30 orang atau 88,23% dan jumlah responden jenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu 4 orang atau 11,76%. Alasan penulis mengambil lebih banyak sampel jenis kelamin laki-laki karena kaum laki-laki lebih banyak mengetahui tentang pemerintahan desa dibandingkan kaum perempuan.

5.2 Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang, baik di dalam Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar bahwa fungsi-fungsi BPD telah dijabarkan dengan jelas.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berfungsi Menetapkan peraturan desa, Menampung aspirasi masyarakat dan Menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD harus teliti melihat situasi dan kondisi desa sehingga dapat menetapkan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa. BPD juga harus mendengarkan, merespon serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah dikemukakan oleh masyarakat.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat melalui uraian berikut :

5.2.1 Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Penetapan peraturan desa diharapkan berdampak pada kemajuan desa dan menguntungkan masyarakat. BPD yang berperan besar untuk mewujudkan hal tersebut karena BPD yang bertugas sebagai pelaksana demokrasi di desa. BPD bekerjasama dengan Kepala Desa dalam merumuskan peraturan desa dan menetapkannya maka BPD dan Kepala Desa harus selalu berkoordinasi agar tidak terjadi miss comunication/kurang komunikasi.

Sumber daya manusia jelas sangat menentukan berjalan atau tidaknya fungsi Badan Permusyawaratan Desa karena dari sumber daya manusia itu mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh anggota BPD tersebut. Sumber Daya Manusia dari Anggota BPD dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.4 Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Anggota BPD.

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	3	37,5%
2.	SMP	4	50%
3.	SMA	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : data olahan penelitian,2013

Dari data yang penulis peroleh melalui arsip-arsip tentang rapat menetapkan peraturan desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bahwa peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa telah dijalankan yaitu Retribusi Non Plasma dikenakan pungutan sebesar Rp.6000/1 bulan/Kepala Keluarga dan Bagi seluruh warga desa tri manunggal dikenakan biaya perawatan makam sebesar 2kg/1 tahun dipungut setiap 6 bulan sekali (1kg/6 bulan). Dan orang-orang yang telah ditetapkan menjadi LINMAS yang baru telah menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan. Namun BPD kurang berpartisipasi dalam menetapkan peraturan desa tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya anggota BPD yang tidak hadir dalam rapat menetapkan peraturan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.2 dan I.3.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan BPD sebagai lembaga yang berfungsi merumuskan dan menetapkan peraturan desa di desa tri manunggal kecamatan tapung kabupaten kampar berdasarkan angket yang telah penulis bagikan kepada responden maka dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel-tabel berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Responden tentang Merumuskan Peraturan Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	-	-
2.	Tidak Baik	22	64,70%
3.	Sangat Tidak Baik	12	35,29%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.5 diatas tentang merumuskan peraturan desa dari 34 responden, yang menyatakan baik 0 responden atau 0,00%. Sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 22 responden atau 64,70% dan 12 responden atau

35,29% yang menyatakan sangat tidak baik. Ini berarti kegiatan merumuskan peraturan desa tidak teratur diadakan oleh BPD tetapi hanya kadang-kadang. Dan tidak semua masyarakat ikutserta dalam merumuskan peraturan desa.

Tabel V.6 Tanggapan Responden tentang Pengadaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa yang diselenggarakan BPD bersama Kepala Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	-	-
2.	Tidak Baik	20	58,52%
3.	Sangat Tidak Baik	14	41,18%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.6 diatas tentang BPD mengadakan rapat membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dari 34 responden, yang menyatakan baik 0 responden atau 0,00% sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 20 responden atau 58,52% dan 14 responden atau 41,18% yang menyatakan sangat tidak baik. BPD hanya kadang-kadang mengadakan rapat dalam membahas rancangan peraturan desa, ini membuktikan BPD kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menetapkan peraturan desa.

Tabel V.7 Tanggapan Responden tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Membuat Peraturan Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	2	5,88%
2.	Tidak Baik	22	64,70%
3.	Sangat Tidak Baik	10	29,41%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.7 diatas tentang keterlibatan masyarakat dalam rapat membuat peraturan desa dari 34 responden, 2 responden atau 5,88% menyatakan

baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 22 responden atau 64,70% dan 10 responden atau 29,41% yang menyatakan sangat tidak baik. Keterlibatan masyarakat dalam rapat membuat peraturan desa jelas diperlukan karena yang dibahas dalam rapat adalah tentang kepentingan masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat terlibat dalam rapat tersebut.

Tabel V.8 Tanggapan Responden tentang BPD dan Kepala Desa Menetapkan Segala Sesuatu yang Menyangkut Kepentingan Masyarakat Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	4	11,76%
2.	Tidak Baik	14	41,18%
3.	Sangat Tidak Baik	16	47,06%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.8 diatas tentang BPD dan Kepala Desa menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dari 34 responden, 4 responden atau 11,76% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 14 responden atau 41,18% dan 16 responden atau 47,06% yang menyatakan sangat tidak baik. Kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dalam menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dinilai kurang karena dilihat dari tanggapan responden lebih banyak yang menyatakan sangat tidak baik. Seharusnya BPD dan Kepala Desa mampu bekerjasama untuk membuat peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.

Tabel V.9 Tanggapan Responden tentang BPD Sosialisasikan Peraturan Desa yang telah disahkan ke Masyarakat Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Selalu	1	2,94%
2.	Kadang-kadang	15	44,12%
3.	Tidak Pernah	18	52,94%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.9 diatas tentang BPD mensosialisasikan peraturan desa ke masyarakat dari 34 responden, 1 responden atau 2,94% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 15 responden atau 44,12% dan 18 responden atau 52,94% yang menyatakan sangat tidak baik. Sosialisasi dari peraturan desa ke masyarakat harus dilakukan karena supaya seluruh masyarakat mengetahui. Selanjutnya dapat mematuhi peraturan desa tersebut jika itu menyangkut dengan ketertiban dan keamanan desa serta dapat berpartisipasi jika peraturan tersebut menyangkut dengan pembangunan desa. Dengan demikian masyarakat akan lebih termotivasi untuk ikutserta dalam memajukan desa.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat (pada desember 2012) beliau mengatakan:

“BPD kurang mensosialisasikan peraturan desa atau hasil rapat kepada masyarakat sehingga peraturan desa atau hasil rapat belum diketahui masyarakat desa secara keseluruhan. Ini mengakibatkan sebagian masyarakat acuh tak acuh dengan keadaan pemerintahan desa”.

Tabel V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Sub Indikator	Kategori Jawaban						N	%
	Baik		Tidak Baik		Sangat Tidak Baik			
	f	%	f	%	f	%		
Merumuskan peraturan desa bersama perangkat desa dan masyarakat.	0	0	22	64,70	12	35,29	34	100
Pengadaan rapat membahas rancangan peraturan desa bersama perangkat desa dan masyarakat.	0	0	20	58,52	14	41,18	34	100
Melibatkan masyarakat dalam rapat membuat peraturan desa.	2	5,88	22	64,71	10	29,41	34	100
Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.	4	11,76	14	41,18	16	47,06	34	100
Mensosialisasikan peraturan desa yang telah disahkan ke masyarakat desa.	1	2,94	15	44,12	18	52,94	34	100
Jumlah	7	4,12	93	54,70	70	41,18	170	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui tentang kinerja BPD dalam menetapkan peraturan desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melalui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fungsi Legislasi yang penulis ajukan sebagai bahan angket yang diberikan kepada responden. Dan tanggapan responden yang menjawab pada alternatif jawaban di kategori “baik” sebanyak 7 responden atau 4,12% ini berarti BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan peraturan desa. Selanjutnya yang menjawab di kategori “tidak baik” sebanyak 93 responden atau 54,70% ini

membuktikan bahwa BPD kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang menjawab di kategori “sangat tidak baik” sebanyak 70 responden atau 41,18% ini berarti banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi di desa. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari anggota BPD kepada masyarakat.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan ketua BPD (pada desember 2012) yaitu:

“Antara BPD dengan Kepala Desa dari dulu memang kurang sejalan. Karena Kepala Desa sangat lambat dalam memberikan laporan tentang ADD kepada BPD”.

Jawaban responden terbanyak pada kategori “tidak baik” dikarenakan BPD telah melaksanakan penetapan peraturan desa. Tetapi penetapan peraturan desa tersebut tidak rutin dilakukan dan tidak terjadwal dengan teratur.

5.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan pendapat atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi diharapkan BPD tersebut mampu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.. Karena masukan-masukan atau saran dari masyarakat dibutuhkan supaya desa mengalami kemajuan dengan adanya perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan serta tata tertib keamanan demi terciptanya ketentraman masyarakat.

Pelaksanaan atau realisasi dari aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar terwujud. Sehingga kemajuan desa dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang selalu diinginkan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Hal tersebut akan terjadi jika didukung dengan kerja keras dari Anggota BPD dan Pemerintah Desa serta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat.

Dari data yang penulis peroleh melalui arsip-arsip tentang rapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bahwa belum semua aspirasi masyarakat yang diungkapkan dalam rapat tersebut terealisasi. Aspirasi masyarakat yang telah diungkapkan dalam rapat adalah sebagai berikut: pembangunan jembatan jalur 6B, 4B, 3B dan penerangan kuburan, pembuatan pagar sekolah 100m, pembuatan kantor dan pembuatan toilet SDN 009, renovasi TK R.A, tanah timbun di posyandu, meja, kursi dan tralis posyandu, perubahan rumah bidan dan pencucian parit jalan poros dari jalur 1-7 serta penimbunan jalan dari jalur 3a-5a. Dan aspirasi tersebut yang belum terealisasi adalah pembangunan jembatan jalur 4b dan 3b, penerangan kuburan, tralis posyandu, pencucian parit jalan poros dari jalur 1-7 serta penimbunan jalan dari jalur 3a-5a. BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat tidak berfungsi dengan baik karena dalam rapat yang diadakan tersebut hanya Ketua BPD yang hadir dan hanya pada satu rapat dalam 2 (dua) kali rapat terakhir. Jika demikian tentu BPD tidak dapat memproses dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Untuk mengetahui kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa tri manunggal kecamatan tapung kabupaten kampar

berdasarkan angket yang telah penulis bagikan kepada responden maka dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel V.11 Tanggapan Responden tentang BPD Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap Aspirasi Dari Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	5	14,70%
2.	Tidak Baik	15	44,12%
3.	Sangat Tidak Baik	14	41,18%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.11 diatas tentang BPD turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dari 34 responden, 5 responden atau 14,70% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 15 responden atau 44,12% dan 14 responden atau 41,18% yang menyatakan sangat tidak baik. BPD berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat namun dalam menjalankan tugasnya tersebut BPD kurang memiliki inisiatif untuk turun langsung ke masyarakat dan menggali aspirasi masyarakat.

Tabel V.12 Tanggapan Responden tentang BPD Mencatat Semua Aspirasi Dari Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	1	2,94%
2.	Tidak Baik	21	61,76%
3.	Sangat Tidak Baik	12	35,29%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.12 diatas tentang BPD mencatat semua aspirasi dari masyarakat dari 34 responden, 1 responden atau 2,94% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 21 responden atau 61,76% dan 12 responden atau 35,29% yang menyatakan sangat tidak baik. Aspirasi yang telah

disampaikan oleh masyarakat ke BPD seharusnya dicatat supaya terdata namun pada kenyataannya tidak semua aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD.

Tabel V.13 Tanggapan Responden tentang BPD Menindaklanjuti Aspirasi Dari Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	3	8,82%
2.	Tidak Baik	24	70,59%
3.	Sangat Tidak Baik	7	20,59%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.13 diatas tentang BPD menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dari 34 responden, 3 responden atau 8,82% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 24 responden atau 70,59% dan 7 responden atau 20,59% yang menyatakan sangat tidak baik. Aspirasi masyarakat yang telah terdata seharusnya ditindaklanjuti namun realitanya tidak selalu aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh BPD. Ini membuktikan bahwa BPD kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Tabel V.14 Tanggapan Responden tentang Jadwal Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	2	5,88%
2.	Tidak Baik	19	55,88%
3.	Sangat Tidak Baik	13	38,23%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.14 diatas tentang jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat dari 34 responden, 2 responden atau 5,88% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 19 responden atau 55,88% dan 13 responden atau 38,23% yang menyatakan sangat tidak baik. Aspirasi masyarakat

yang telah ditindaklanjuti dan akan dilaksanakan maka terlebih dahulu ditetapkan jadwalnya supaya semua masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya telah diproses dan dapat melihat pelaksanaannya.

Tabel V.15 Tanggapan Responden tentang Koordinasi Jadwal Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	2	5,88%
2.	Tidak Baik	18	52,94%
3.	Sangat Tidak Baik	14	41,18%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.15 diatas tentang koordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat dari 34 responden, 2 responden atau 5,88% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 18 responden atau 52,94% dan 14 responden atau 41,18% yang menyatakan sangat tidak baik. Setelah jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat ditetapkan seharusnya dikoordinasikan ke masyarakat karena tidak semua masyarakat pergi ke kantor desa untuk memeriksa apakah ada pengumuman baru atau tidak. Namun dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi dari BPD tentang jadwal pelaksanaan aspirasi masyarakat.

Tabel V.16 Tanggapan Responden tentang Rapat Koordinasi Antara BPD dengan Perangkat Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	3	8,82%
2.	Tidak Baik	24	70,59%
3.	Sangat Tidak Baik	7	20,59%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.16 diatas tentang rapat koordinasi antara BPD dengan Perangkat Desa dari 34 responden, 3 responden atau 8,82% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 24 responden atau 70,59% dan 7 responden atau 20,59% yang menyatakan sangat tidak baik. Rapat koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa diperlukan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik. Namun rapat tersebut ternyata hanya terlaksana kadang-kadang.

Tabel V.17 Tanggapan Responden tentang BPD Telah Melaksanakan Kepentingan Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	4	11,76%
2.	Tidak Baik	26	76,47%
3.	Sangat Tidak Baik	4	11,76%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.17 diatas tentang BPD melaksanakan kepentingan masyarakat dari 34 responden, 4 responden atau 11,76% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 26 responden atau 76,47% dan 4 responden atau 11,76% yang menyatakan sangat tidak baik. BPD bekerjasama dengan Kepala Desa untuk melaksanakan kepentingan masyarakat melalui peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan namun realitanya hal tersebut belum berjalan maksimal.

Tabel V.18 Tanggapan Responden tentang BPD Mengawasi Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	2	5,88%
2.	Tidak Baik	18	52,94%
3.	Sangat Tidak Baik	14	41,18%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.18 diatas tentang BPD mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dari 34 responden, 2 responden atau 5,88% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak Baik sebesar 18 responden atau 52,94% dan 14 responden atau 41,18% yang menyatakan sangat tidak baik. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan desa merupakan tugas BPD namun dalam menjalankan tugas tersebut BPD kurang bertanggungjawab sehingga belum seratus persen melaksanakannya.

Tabel V.19 Tanggapan Responden tentang Koordinasi Dari BPD Dalam Rapat Ulang Jika Pelaksanaan Aspirasi Belum Terealisasi.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	1	2,94%
2.	Tidak Baik	18	52,94%
3.	Sangat Tidak Baik	15	44,12%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.19 diatas tentang BPD mengkoordinasi rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi dari 34 responden, 1 responden atau 2,94% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 18 responden atau 52,94% dan 15 responden atau 44,12% yang menyatakan sangat tidak baik. Tidak semua pelaksanaan aspirasi dari masyarakat langsung terealisasi maka diperlukan rapat ulang untuk membahas solusi yang harus dilakukan. Namun minimnya koordinasi dari BPD berdampak pada minimnya yang hadir dalam rapat tersebut sehingga musyawarah untuk mendapatkan solusi kurang mendapatkan masukan dari peserta rapat.

Tabel V.20 Tanggapan Responden tentang Terealisasinya Pelaksanaan Dari Aspirasi Masyarakat Yang Telah Disampaikan Masyarakat Ke BPD.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase(%)
1.	Baik	1	2,94%
2.	Tidak Baik	30	88,23%
3.	Sangat Tidak Baik	3	8,82%
Jumlah		34	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Berdasarkan tabel V.20 diatas tentang terealisasi pelaksanaan dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan masyarakat ke BPD dari 34 responden, 1 responden atau 2,94% menyatakan baik sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 30 responden atau 88,23% dan 3 responden atau 8,82% yang menyatakan sangat tidak baik. Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat ke BPD tidak semua terealisasi hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden banyak yang menyatakan tidak baik.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa (pada desember 2012) yaitu:

Tidak semua aspirasi yang telah disampaikan masyarakat ke BPD terealisasi karena tidak semua aspirasi masyarakat ditanggapi dengan baik oleh BPD. Jika sekiranya aspirasi masyarakat masih sulit untuk ditangani maka aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti”.

Tabel V.21 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Sub Indikator	Kategori Jawaban						N	%
	Baik		Tidak Baik		Sangat Tidak Baik			
	F	%	f	%	f	%		
Turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.	5	14,70	15	44,12	14	41,18	34	100
Mencatat semua aspirasi dari masyarakat.	1	2,94	21	61,76	12	35,29	34	100
Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.	3	8,82	24	70,59	7	20,59	34	100
Pengumuman jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat.	2	5,88	19	55,88	13	38,23	34	100
Mengkoordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat.	2	5,88	18	52,94	14	41,18	34	100
Rapat koordinasi antara BPD dengan Perangkat Desa.	3	8,82	24	70,59	7	20,59	34	100
Melaksanakan kepentingan masyarakat.	4	11,76	26	76,47	4	11,76	34	100
Mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.	2	5,88	18	52,94	14	41,18	34	100
Koordinasi rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi belum terealisasi.	1	2,94	18	52,94	15	44,12	34	100
Terealisasinya pelaksanaan dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan masyarakat ke BPD.	1	2,94	30	88,23	3	8,82	34	100
Jumlah	24	7,06	213	62,65	103	30,29	340	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui tentang kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melalui pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang penulis ajukan sebagai bahan angket yang diberikan kepada responden. Dan tanggapan responden yang menjawab pada alternatif jawaban di kategori “baik” sebanyak 24 responden atau 7,06% ini berarti BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang menjawab di kategori “tidak baik” sebanyak 213 responden atau 62,65% ini berarti dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD belum menyerap sampai di setiap lapisan masyarakat dan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aspirasi masyarakat masih belum seratus persen (100%). Dan yang menjawab di kategori “sangat tidak baik” sebanyak 103 responden atau 30,29%. Ini berarti masih banyak masyarakat yang belum digali aspirasinya oleh BPD dan banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang perkembangan desa.

Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh tokoh masyarakat (pada desember 2012) yaitu:

“BPD belum menyerap aspirasi keseluruhan bagian masyarakat karena BPD hanya kadang-kadang turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat”.

Demikian juga dengan yang dikatakan oleh tokoh masyarakat (pada desember 2012) yaitu:

“Anggota BPD kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan mereka kurang menguasai ilmu pemerintahan sebab tingkat pendidikan yang tertinggi hanya sampai tamat SMA bahkan tingkat pendidikan ketua BPD hanya tamat SMP”.

Jawaban terbanyak pada kategori “tidak baik” karena dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD tidak berkesinambungan atau tidak berjalan terus-menerus namun hanya kadang-kadang dan pelaksanaan dari aspirasi masyarakat masih banyak yang belum terealisasi. Dengan kata lain

fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan secara optimal.

5.3 Analisis Data

Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan kenyataan di lapangan penulis melakukan observasi, wawancara dan pemberian angket terhadap sampel penelitian. Dari data-data yang telah diperoleh tersebut maka penulis menganalisis dengan menyajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori. Setelah tanggapan responden dikelompokkan menurut indikator-indikatornya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel V.22 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian Tentang Fungsi BPD di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Sub Indikator	Kategori Jawaban						N	%
	Baik		Tidak Baik		Sangat Tidak Baik			
	f	%	f	%	f	%		
Menetapkan Peraturan Desa.	7	4,12	93	54,70	70	41,18	170	100
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.	24	7,06	213	62,65	103	30,29	340	100
Jumlah	31	6,08	306	60	173	33,92	510	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2013

Keterangan :

F : Frekuensi

% : Persentase

N : Jumlah Subyek Penelitian

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah persentase pelaksanaan fungsi BPD di desa tri manunggal kecamatan tapung kabupaten

Kampar. Untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja yang dilakukan maka akan diberi ukuran (Husaini Usman,2009:146).

$$\text{Baik} : 31 \times 3 = 93$$

$$\text{Tidak Baik} : 306 \times 2 = 612$$

$$\text{Sangat Tidak Baik} : 173 \times 1 = 173$$

$$= 878$$

$$F = 878$$

$$N = 510 \times 3 = 1530$$

$$P = \frac{878}{1530} \times 100\%$$

$$= 57,38\%.$$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam mewujudkan demokrasi di desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masuk pada kategori **Tidak Baik** hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 57,38% atau berada pada jarak interval 31% - 60%.

Hasil penelitian berada pada kategori tidak baik karena dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yang harus diperhatikan dan perlu ada pembenahan atau perbaikan supaya pelaksanaan fungsi BPD dapat lebih baik lagi dan lebih dapat memajukan desa dalam perwujudan demokrasi. BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun kurang maksimal dalam prosesnya sehingga belum mencapai taraf yang memuaskan bagi masyarakat.

Maka dari itu penulis melakukan identifikasi mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan fungsi BPD di desa Tri Manunggal tersebut. Sehingga terlihat kekurangan-kekurangan BPD yang kemudian dapat dijadikan panduan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa hambatannya adalah:
 - a. Masih kurangnya kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dan juga masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang pemerintahan juga menjadi kendala bagi anggota BPD disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan mereka. Ketua BPD yang menjadi pemimpin dalam lembaga tersebut hanya sampai tamat SMP.
 - c. Kurangnya tanggungjawab anggota BPD untuk mensosialisasikan peraturan desa ke masyarakat.
2. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hambatannya adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran dari anggota BPD untuk melakukan tugasnya dalam menyerap dan mengarsipkan aspirasi masyarakat.
 - b. Kurangnya inisiatif anggota BPD untuk turun langsung kelapangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perbaikan-perbaikan desa supaya desa lebih maju.

- c. Kurangnya koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam memproses aspirasi masyarakat.
- d. Kurang maksimal kinerja BPD dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
- e. Kurangnya tanggungjawab BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aspirasi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada pada kategori **“Tidak Baik”** dengan persentase **57,38%**.

Dikatakan tidak baik karena kinerja BPD masih kurang maksimal disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan. Dan yang menjadi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dan juga masyarakat dalam menangani permasalahan desa atau jalannya pemerintahan desa.
2. Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di desa.
3. Kurangnya ilmu tentang pemerintahan disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan anggota BPD.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa dapat bekerjasama serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani permasalahan desa dan melakukan perbaikan-perbaikan serta melakukan pembangunan-pembanguna demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.
2. Diharapkan Anggota BPD dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan dapat berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, H.A.2009.*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*.Kencana:Jakarta
- Kansil, C.S.T.2001.*Pemerintah Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta
- Marbun, SF dkk.2001.*Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*.UII Pers:Yogyakarta
- Mardani.2011.*Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*.Rajawali Pers:Jakarta
- Nurcholis, Hanif.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Erlangga:Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007, *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa*
- Pulungan, Suyuthi.2002.*Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.PT RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Rivai, Veitzal.2004.*Kepemimpinan*.Grafindo Persada:Jakarta
- Santoso, Ananda dan Priyanto S.1995.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Kartika:Surabaya
- Sedarmayanti.2004.*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*.Mandar Maju.Bandung
- Siagian, S.P.2001.*Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*.PT Bumi Aksara:Jakarta
- Sugiono.2007.*Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R dan D*.cv Alfabeta:Bandung
- Suryabrata, Sumadi.2006.*Metodologi Penelitian*.PT RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Thoha, Miftah.1990.*Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*.Sinar Baru:Bandung
- Usman, Husaini.2009.*Metodologi Penelitian Sosial*.Bumi Aksara:Jakarta
- Widjaja, HAW.2010.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*.Rajawali Pers:Jakarta